



## Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi

Ikman Nur Rahman<sup>ab,1\*</sup>, Dasim Budimansyah<sup>a,2</sup>, Karim Suryadi<sup>a,3</sup>, Dadang Sundawa<sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

<sup>1</sup> [ikmannurrahman@upi.edu](mailto:ikmannurrahman@upi.edu)\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 7 Juni 2024;

Revised: 15 Juni 2024;

Accepted: 29 Juni 2024.

---

### Kata-kata kunci:

Kecerdasan Kewargaan;  
Kompetensi Warga Negara;  
Nilai Demokratis.

---

### ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana pendidikan demokrasi dimana nilai-nilai demokrasi diintegrasikan dalam pembelajaran agar warga negara memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali konsep kecerdasan kewargaan (civic intelligence) untuk memperluas konsep kompetensi warga negara yang telah digagas sebelumnya oleh Douglas Schuler serta Winataputra dan Somantri. Melalui desain kualitatif, penelitian ini menyajikan analisis indikator kecerdasan kewargaan sehingga dapat secara efektif memposisikannya dalam pencapaian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menembangkan nilai demokratis. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan metode purposive sampling, dilakukan melalui focus discussion group dengan 13 pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di 6 kampus yang tersebar di provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan mempertanyakan konsepsi kecerdasan kewargaan sehingga didapatkan kerangka baik secara konseptual maupun operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 8 nilai-nilai demokratis yang dapat dikembangkan melalui kecerdasan kewargaan yaitu kebebasan berkelompok, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, kesamaan derajat, kepercayaan, taat terhadap hukum, toleransi dan saling menghormati

---

### ABSTRACT

**Strengthening Civic Intelligence to Develop Democratic Values in Higher Education.** Civic education is a means of democratic education where democratic values are embedded in learning so that citizens have the competence to become democratic citizens. This research aims to reintroduce the concept of civic intelligence to expand the concept of citizen competence which was previously initiated by Douglas Schuler and Winataputra and Somantri. Through a qualitative exploratory design, this research presents an analysis of indicators of civic intelligence so that it can effectively position them in achieving the goals of Citizenship Education in developing democratic values. This research used a non-probability sampling method with a purposive sampling method, carried out through focus group discussions with 13 Citizenship Education teachers on 6 campuses spread across Banten province. This research was carried out by extracting the concept of civic intelligence to obtain a framework both contextually and operationally. The research results show that there are 8 democratic values that can be developed through civic intelligence are freedom of group, freedom of opinion, freedom of participation, equality, trust, obedience to the law, tolerance and mutual respect.

---

### Keywords:

Civic Intelligence;  
Civic Competences;  
Democratic Value.

---

Copyright © 2024 (Ikman Nur Rahman, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Rahman, I. N., Budimansyah, D., Suryadi, K., & Sundawa, D. (2024). Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 120–129. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10237>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini merujuk pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 versi The Economist Intelligence Unit (EIU, 2022), Indonesia menduduki peringkat ke 52 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,71. Artinya, negara kita masih masuk dalam kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*). Seperti kita ketahui bahwa indeks demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator yaitu penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil. Hal yang lebih lanjut dijelaskan dalam negara yang termasuk kelompok cacat ini pada umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar, namun masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintahan yang kurang optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 3 tahun terakhir yakni 2018-2020 variabel Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menunjukkan angka yang terendah dibandingkan dengan variabel lainnya, bahkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun dari 56,72% ke angka 54,00%.

Hal ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2018 di angka 54,28%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di Indonesia masih lemah. Artinya untuk menjadi negara demokrasi penuh (*full democracy*) Indonesia harus dapat meningkatkan lagi partisipasi warga negaranya dalam kepentingan-kepentingan publik dengan cara menumbuhkan kompetensi warga negara. Pengembangan kompetensi warga negara ini merupakan tanggung jawab dari Pendidikan Kewarganegaraan baik itu yang dilaksanakan di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.

Tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menjadi warga negara yang *smart and good citizens* atau menjadi warga negara yang cerdas (Budimansyah, 2022). Dalam mencapai hal itu, maka kompetensi yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan saat ini masih merujuk pada penelitian yang dilakukan IEA terhadap implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di 28 negara secara umum menyimpulkan bahwa komponen PKn meliputi aspek *civic knowledge*, *civic engagement*, dan *civic attitudes* serta konsep lainnya (Torney-purta et al., 2001). Adapun materi PKn yang diteliti meliputi materi demokrasi, kewarganegaraan, identitas nasional, hubungan internasional dan keragaman/kohesi sosial (Torney-Purta, et.al, 2001). Kemudian Patrick dan Vontz dalam (Arif, 2016) mengelompokkan komponen kompetensi kajian kewargaan menjadi empat, yaitu (1) pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan dalam demokrasi (*civic knowledge*); (2) keterampilan kognitif kewarganegaraan (*cognitive civic skills*); (3) keterampilan partisipatori warga negara demokratis (*participatory civic skills*); dan (4) kebajikan dan watak warga negara demokratis (*civic disposition*). Perdebatan mengenai kompetensi warga negara meliputi berbagai segi, banyak para ahli menganjurkan kompetensi warga negara yang dilembagakan EU (Chrysochoou, 2002), yang diintegrasikan dalam konten pendidikan (Poghosyan, 2019). Perlunya kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengajarkan nilai demokratis warga negara juga sangat ditekankan (Print & Lange, 2013). Perspektif ini menekankan pentingnya kompetensi warga negara dalam menumbuhkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali konsep kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) yang dipopulerkan oleh Douglas Schuler, 2001 sebagai perspektif baru kompetensi warga negara dengan maksud untuk memperluas cakupan kompetensi tersebut

agar tidak hanya terfokus pada kompetensi yang bersifat privat saja, namun menyentuh area kompetensi yang bersifat publik. Kecerdasan kewargaan merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, berkomunikasi, dan bertindak untuk mengatasi tantangan bersama secara efisien dan merata. Kecerdasan kewargaan mengacu pada kemampuan manusia untuk menggunakan informasi dan komunikasi untuk terlibat dalam pemecahan masalah kolektif. Kecerdasan kewargaan menjadi prasyarat membangun keadaban publik (*civic virtue*) dengan sistem demokrasi substansial yang mengandung iklim kebebasan yang lebih luas dan sehat. Dalam alam demokrasi dengan keadaban publik (*public civility*) terbangun sikap dan perilaku yang mampu menghargai, menghormati dan peduli dengan orang lain, patuh pada tatanan sosial dengan orang lain dan dalam kehidupan publik, yakni dalam bermasyarakat dan bernegara bangsa (Budimansyah, 2022). Demi keterlibatan aktif dan produktif di bidang publik, warga dituntut untuk memiliki kecerdasan. Bukan hanya kecerdasan personal yang bersifat privat, tetapi terutama kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) yang bersifat publik. Kecerdasan kewargaan dapat ditumbuhkembangkan melalui penciptaan: (1) iklim bebas berbicara, (2) berkumpul, berserikat dan berorganisasi dan (3) mengembangkan diri. Hal ini relevan untuk negara-negara yang menganut sistem demokrasi.

Berbagai penelitian telah mencoba menyusun kerangka berpikir dan indikator kecerdasan kewargaan. Diantaranya adalah (Hidayah et al., 2020) memperkenalkan konsep kecerdasan kewarganegaraan sebagai perwujudan kecerdasan kolektif yang dapat melayani kebutuhan para peneliti dan praktisi yang bekerja di persimpangan antara masyarakat dan teknologi. Kecerdasan Kewargaan memiliki empat dimensi yaitu (1) kecerdasan kewargaan, (2) pengetahuan kewargaan, (3) watak kewargaan dan (4) keterampilan kewargaan. Terdapat dua konsep antara *civic intelligence* dengan *citizen intelligence*, dimana kecerdasan kewargaan secara definitif dijelaskan dengan frasa "*citizen intelligence*" dan "*civic intelligence*" diartikan sebagai pengetahuan kewargaan sebagai bagian dari kecerdasan kewargaan. Pendapat ini memiliki potensi ambiguitas konseptual sehingga harus dikonfirmasi kembali keabsahannya. Sedangkan penelitian (Puspitasari et al., 2022) menjelaskan bahwa Kecerdasan Kewargaan meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual dalam kerangka kompetensi warga negara. Dari tiga penelitian di atas bisa kita simpulkan bahwa terdapat kerancuan dan ketidakajegan dalam konseptualisasi kecerdasan kewargaan yang akan berakibat pada krisis operasional. Lain halnya dengan (Skarzauskiene, 2018) menggunakan indeks potensi kecerdasan kolektif untuk mengevaluasi potensi platform Civic Tech, sementara (Schuler, 2014) mengusulkan kerangka kerja dengan lima kapasitas : pengetahuan, sikap, modal organisasi, modal relasional dan modal sosial, serta sumber daya finansial dan material. Kerangka kerja ini dibahas lebih lanjut dalam konteks Computer-Supported Cooperatif Work (CSCW) oleh (Schuler, 2012).

Kecerdasan kewargaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai demokratis. Kecerdasan kewargaan meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi perubahan sosial dan politik. Dalam konteks demokrasi, kecerdasan kewargaan membantu warga negara untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kecerdasan kewargaan menjadi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini

berusaha untuk membangun kerangka konseptual sistemik kecerdasan kewargaan untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai prespektif baru kompetensi warga negara yang dinamai dengan kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*). Dalam konteks ini, hasil yang diharapkan adalah pengembangan nilai demokratis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu metode deskriptif dapat digunakan untuk memberikan generalisasi terhadap data yang didapatkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan detail tentang kajian yang sedang diteliti (Creswell, 2014). Penelitian ini melibatkan 13 orang dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di beberapa perguruan tinggi di Provinsi Banten, antara lain Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Universitas Banten Jaya, Universitas Prima Graha, Universitas Faletihan dan Universitas Pamulang. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara mendalam melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dan panduan observasi. Proses studi memperluas dua pertanyaan utama yakni pola pemahaman pengajar Pendidikan Kewarganegaraan mengenai kompetensi warga negara dan kecerdasan kewargaan. FGD kemudian dilakukan untuk mengklasifikasikan nilai-nilai demokratis apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Analisis Data kualitatif menurut Creswell meliputi 4 langkah: (1) *data managing*: proses mengelola dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan, serta mengelompokkan data menjadi tema-tema yang relevan dengan penelitian; (2) *reading, memoing*: proses membaca data yang telah dikelompokkan dan memberikan catatan khusus untuk pernyataan setiap narasumber, serta membuat kode untuk data yang terkait; (3) *describing, classifying, interpreting*: proses menggambarkan pengalaman pribadi dan menggambarkan esensi dari fenomena yang diteliti; (4) *representing, visualizing*: proses mewakili data dalam bentuk narasi yang kualitatif dan visual, serta menjelaskan temuan dalam analisis. Langkah-langkah ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang dikumpulkan menjadi kerangka berfikir dan indikator kecerdasan kewargaan yang dapat diaplikasikan untuk mengembangkan nilai demokratis.

## Hasil dan pembahasan

Kompetensi warga negara mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan berkontribusi positif kepada negara dan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan kecerdasan kewargaan atau *civic intelligence* yang merupakan kemampuan individu atau masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan demokratis. Sehingga kompetensi warga negara merupakan kemampuan yang bersifat privat sedang kecerdasan kewargaan merupakan kapasitas yang bersifat publik. Pengembangan kecerdasan kewargaan yang baik membantu individu untuk memahami, menghormati, dan mempraktikkan nilai-nilai demokratis, sementara nilai-nilai demokratis memberikan kerangka kerja yang penting bagi perkembangan kecerdasan kewarganegaraan yang efektif dan berkelanjutan.

Nilai-nilai demokratis memberikan fondasi yang penting bagi masyarakat yang adil dan merata, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepatuhan pada supremasi hukum dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip

ini tidak hanya membentuk struktur politik suatu negara, tetapi juga memengaruhi interaksi individu dan kelompok dalam masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai demokratis meliputi: (a) kebebasan berkelompok; (b) kebebasan berpendapat; (c) kebebasan berpartisipasi; (d) kesamaan derajat; (e) kepercayaan; (f) taat terhadap hukum; (g) toleransi; (h) saling menghormati menjadi dasar bagi masyarakat demokratis untuk menjamin kebebasan, keadilan, serta kelanjutan politik yang stabil dan inklusif.

Pertama, kebebasan berkelompok biasanya dengan metode diskusi dalam hal ini mahasiswa biasanya diberikan kebebasan memilih dengan siapa saja mereka berdiskusi tanpa dibatasi untuk menjadi anggota kelompoknya. Namun belakangan metode ini kurang efektif, karena terdapat kesenjangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Akhirnya dosen membagi kelompok secara heterogen antara mahasiswa yang mudah memahami materi kuliah dengan mahasiswa yang lebih lamban. Dosen biasanya memberikan arahan untuk saling membantu antar anggota kelompok. Dengan cara ini pula dapat mengurangi kegaduhan dalam kelas karena dosen menggabungkan mahasiswa yang aktif dengan yang pasif.

Kedua, kebebasan mengemukakan pendapat merupakan perlindungan kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan perlakuan adil dalam mengungkapkan keyakinannya. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pendapat setiap orang sangat berharga dan harus diungkapkan tanpa rasa takut atau ancaman dari pihak lain. Pada saat yang sama, kebebasan mengemukakan pendapat dibatasi dengan saling menghormati pendapat dosen atau mahasiswa lainnya. Biasanya dipraktekkan pada saat proses pembelajaran berlangsung dosen memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, sanggahan ataupun argumen lain sehingga pembelajaran bisa lebih dinamis. Di akhir pemberian materi biasanya dosen bertanya, “sampai sini ada yang mau ditanyakan?”, “adakah yang tidak setuju dengan pendapat Bapak/Ibu?”, “silahkan bagi yang tidak sependapat dengan pernyataan Bapak/Ibu”. Hal lain dilakukan pada saat ada mahasiswa yang bertanya, maka sebelum memberikan jawaban biasanya dosen memberikan kesempatan pada mahasiswa lain untuk menjawab dengan kalimat “ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan ini?”. Begitupun dalam diskusi kelompok mahasiswa terbiasa bertukar informasi dan pendapat terkait topik yang dibahas.

Ketiga, kebebasan berpartisipasi biasanya terlihat pada saat dosen memberikan tugas kelompok, setiap kelompok memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mengerjakan tugas, meskipun biasanya partisipasi tiap anggota kelompok berbeda, namun disitulah proses penilaian dilakukan oleh dosen. Seperti ada kalanya pada saat presentasi akan kelihatan mahasiswa yang betul-betul berpartisipasi dalam pengerjaan tugas, ada yang kontribusinya kurang. Pemberian model pembelajaran berbasis proyek atau penelitian berbasis masalah sering dilakukan oleh para dosen untuk mengembangkan kebebasan berpartisipasi, dengan menggunakan metode ini mahasiswa berkesempatan untuk memilih topik dari proyek atau penelitian mereka sendiri yang memungkinkan mereka mengikuti minat pribadi dan memiliki motivasi untuk berkontribusi dalam kelompok.

Keempat, kesamaan derajat dalam pembelajaran bisa terlihat dalam berbagai kegiatan seperti dosen selalu memperhatikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang setara terhadap bahan pelajaran, buku dan materi ajar. Dalam pemilihan anggota kelompok yang tidak membedakan gender, tidak membedakan suku, agama, ras, dan lainnya. Begitupun dalam memberikan penilaian serta umpan balik yang konstruktif semuanya dilakukan tanpa melihat latar belakang, gender dan lainnya.

Kelima, kepercayaan ini bisa berarti kepercayaan pada diri sendiri maupun percaya pada orang lain. Kepercayaan diri bisa dibentuk melalui tugas presentasi di depan kelas. Kepercayaan terhadap orang lain dapat dilihat dari pembagian tugas kelompok. Kepercayaan bukan hanya antar mahasiswa saja tetapi juga adanya hubungan positif antara dosen dan mahasiswa. Beberapa dosen mengatakan hal ini bisa dilakukan dengan cara menunjukkan empati kepada seluruh mahasiswa misalkan jika ada mahasiswa yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, dosen dengan terbuka memberikan bantuan, mendengarkan setiap pendapat mereka dengan penuh perhatian, dan tanggap kebutuhan mereka secara individu. Mahasiswa yang merasa didukung secara emosional lebih cenderung membuka diri dalam pembelajaran. Pendapat lain mengatakan kepercayaan dapat ditumbuhkan dengan memberikan tantangan sesuai tingkat kompetensi mahasiswa, ini akan memungkinkan mereka berkembang tanpa merasa terlalu tertekan. Beri mahasiswa ruang untuk mencoba hal-hal baru dan melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Keenam, taat terhadap hukum. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa setiap dosen memiliki aturan akademis masing-masing dalam kelasnya. Seperti misalkan aturan minimal kehadiran sebagai syarat untuk mengikuti ujian, aturan penggunaan alat komunikasi ketika pembelajaran berlangsung, aturan pengumpulan tugas, bahkan yang terbaru adalah aturan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk pengerjaan tugas. Namun untuk menerapkan nilai demokratis, dosen tidak boleh secara otoriter menetapkan aturan ini semauanya. Baiknya aturan ini didiskusikan dengan mahasiswa sehingga aturan yang disepakati bersama dapat ditaati tanpa keterpaksaan. Selain itu dibutuhkan penegakkan hukum yang baik dari dosen, dengan cara evaluasi yang adil dan transparan pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

Ketujuh, toleransi. Dosen-dosen yang diwawancarai sepakat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah yang memiliki konsentrasi yang besar untuk mengembangkan nilai toleransi. Hampir di semua materi, nilai toleransi selalu disisipkan misalkan dalam materi identitas nasional, dimana setiap mahasiswa wajib untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Hak dan kewajiban warga negara dimana undang-undang dasar mengatur tentang keberagaman, materi demokrasi dimana setiap orang punya hak yang sama, dan wawasan kebangsaan memberikan pemahaman bahwa identitas daerah sebagai penguat kebudayaan nasional dan lain sebagainya. Mengembangkan sikap ini biasanya dilakukan dengan metode diskusi dimana setiap mahasiswa tidak boleh memaksakan pendapatnya. Beberapa dosen bahkan melaksanakan kegiatan kolaborasi antar budaya pada saat materi wawasan kebangsaan. Proyek ini melibatkan kolaborasi antar mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk menunjukkan kreasi-kreasi dari daerahnya masing-masing. Jika kelas bersifat homogen dosen bisa menugaskan mahasiswa untuk mempelajari budaya lain melalui lagu-lagu atau tari-tarian serta pakaian adat dari daerah lain yang akhirnya dipresentasikan dan diapresiasi oleh mahasiswa lainnya di depan kelas atau diperlombakan dengan kelas lainnya.

Kedelapan, saling menghormati pada saat pembelajaran antara dosen dan mahasiswa tentu dibiasakan untuk saling menghormati baik secara sikap maupun perkataan. Praktik yang biasa dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung seperti penggunaan bahasa yang sopan dan elegan saat berkomunikasi baik di dalam kelas maupun interaksi antar siswa. Para dosen sepakat bahwa untuk menanamkan nilai saling menghormati ini diperlukan keteladanan, dimana dosen harus menunjukkan sikap menghormati dan menghargai setiap individu dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.

Nilai-nilai demokratis, dengan demikian adalah fondasi yang penting dalam masyarakat yang adil dan merata, mengusung prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepatuhan pada supremasi hukum dan akuntabilitas. Nilai-nilai ini tidak hanya menentukan struktur politik suatu negara, tetapi juga mempengaruhi interaksi individu dan kelompok dalam masyarakat yang demokratis. Nilai tersebut mencakup partisipasi politik, keadilan, hak asasi manusia, pluralisme, dan proses kompetitif dalam pengambilan keputusan politik, yang bersama-sama membentuk dasar bagi masyarakat demokratis untuk memastikan kebebasan, keadilan, serta kelanjutan politik yang stabil dan inklusif.

Keterkaitan antara kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) dengan nilai-nilai demokratis sangat erat karena kecerdasan kewarganegaraan tidak hanya mencakup pemahaman tentang struktur dan proses politik, tetapi juga bagaimana individu atau masyarakat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kecerdasan kewarganegaraan yang komprehensif tidak hanya membantu individu untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang demokratis, tetapi juga mendorong dan memperkuat nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri. Melalui pendidikan dan pengembangan kecerdasan kewarganegaraan, masyarakat dapat memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai demokratis, yang esensial untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat memilih mitra diskusi secara bebas tanpa dibatasi kelompoknya. Mereka didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan dosen dan sesama mahasiswa, serta menjunjung prinsip kesamaan dan saling menghormati dalam interaksi kelompok. Hal ini membantu membangun kepercayaan, ketaatan terhadap hukum, dan sikap toleransi yang penting dalam konteks akademik.

Berdasarkan pendapat yang telah ada sebelumnya (Somantri & Winataputra, 2017) bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi psikologis-pedagogis untuk mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) sebagai bekal untuk mewujudkan kewajiban dan haknya secara harmonis dalam kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber dari sila keempat Pancasila.

Tabel 1. Indikator Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis

No	Aspek	Nilai Demokratis yang dikembangkan
1	Pengetahuan Kewargaan	Pengetahuan mengenai politik dan hukum, identitas nasional, hak dan tanggung jawab warganegara <i>dan rule of law</i>
2	Sikap Kewarganegaraan	Mengemukakan pendapat, memaparkan informasi, kritis terhadap pendapat orang, mengutamakan kepentingan umum
3	Keterampilan Kewarganegaraan	Keterampilan intelektual: berpikir kritis dan analitis, komunikasi efektif, berorganisasi dan mengelola konflik, memecahkan masalah, mengambil keputusan Keterampilan partisipatoris: berpartisipasi dalam kebijakan publik, mengambil keputusan politik, mempengaruhi jalannya pemerintahan, berkoalisi dan mengelola konflik, mengelola keuangan dan sumber daya
4	Komitmen Kewarganegaraan	Keterlibatan aktif, keterbukaan, keteraturan, keterbukaan informasi, keterlibatan dalam keputusan
5	Keteguhan Kewarganegaraan	Kesadaran hak dan kewajiban, komitmen terhadap negara dan masyarakat, penghargaan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip, keterampilan bekerjasama

---

6	Kecakapan Kewarganegaraan	Memahami ideologi Pancasila, berpikir kritis, berpikir ilmiah, keterampilan sosial, berpikir strategis, berpikir kreatif dan inovatif
7	Kebajikan/Keadaban Kewarganegaraan	Partisipasi demokratis, pemahaman sistem politik, keterlibatan sosial, keterbukaan terhadap perspektif lain, etika publik, kepatuhan terhadap hukum, kritis terhadap kekuasaan.
8	Partisipasi/Tanggung Jawab Kewarganegaraan	Pemenuhan kewajiban hukum, partisipasi politik, keterlibatan sosial, pemberdayaan masyarakat, kesadaran lingkungan, kritis terhadap keadilan sosial, kewajiban pendidikan

---

Beberapa keterkaitan konkrit antara kecerdasan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokratis: Pertama, pengetahuan kewarganegaraan tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme demokrasi adalah fondasi utama dalam memahami nilai-nilai demokratis seperti kebebasan berpendapat, hak setara, dan keadilan. Individu yang berpengetahuan kewarganegaraan yang baik cenderung lebih mampu menghargai dan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam interaksi mereka dengan masyarakat dan pemerintah. Kedua, sikap kewarganegaraan. Sikap kewarganegaraan yang baik tidak hanya mencakup keterlibatan aktif dalam kehidupan politik dan sosial, tetapi juga mencerminkan penghargaan yang mendalam terhadap nilai-nilai dasar demokrasi. Dengan mempraktikkan sikap-sikap ini, individu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan dan pemeliharaan masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Ketiga, keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berargumentasi secara rasional, berpartisipasi dalam proses politik, dan bekerja sama dalam masyarakat adalah esensial dalam mendukung nilai-nilai demokratis. Misalnya, kemampuan untuk berdialog secara efektif dan mengelola konflik secara konstruktif merupakan bagian dari keterampilan kewarganegaraan yang mendukung proses demokratis. Keempat, komitmen kewarganegaraan untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik dan sosial merupakan manifestasi dari nilai-nilai demokratis seperti partisipasi publik dan pengambilan keputusan bersama. Individu yang memiliki komitmen kuat terhadap kewarganegaraan cenderung bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dalam upaya mereka untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Kelima, keteguhan kewarganegaraan ini mencakup sikap-sikap mental seperti kesediaan untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghormati perbedaan pendapat, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Nilai-nilai demokratis seperti pluralisme, toleransi, dan persamaan diinternalisasikan melalui disposisi kewarganegaraan yang positif.

Keenam, keadaban kewarganegaraan mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai seperti kebebasan individu, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Nilai-nilai ini merupakan landasan utama dari sistem demokrasi yang menghargai hak-hak asasi manusia dan menjamin perlindungan terhadap diskriminasi. Ketujuh, tanggung jawab kewarganegaraan budaya kewarganegaraan yang kuat mencerminkan bagaimana nilai-nilai demokratis tercermin dalam norma-norma sosial, institusi, dan praktik sehari-hari dalam masyarakat. Masyarakat yang menganut budaya kewarganegaraan yang baik cenderung mendukung partisipasi aktif, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

---

## Simpulan

Kerangka konseptual kecerdasan kewargaan merupakan perluasan dari konsep kompetensi kewargaan. Kecerdasan Kewargaan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang sikap dan nilai-nilai yang mendorong individu untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Pengembangan kecerdasan kewarganegaraan, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk kewarganegaraan yang berkelanjutan dan demokratis. Hal yang didalamnya memuat indikator dan kompetensi yang diperlukan agar Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjalankan fungsinya sebagai Pendidikan demokrasi warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam mengembangkan nilai-nilai demokratis, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat disusun instrumen baku dari kerangka konseptual ini yang pada akhirnya dapat secara operasional digunakan dalam mengukur kecerdasan kewargaan terutama dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

## References

- Arif, D. B. (2016). Pengembangan komponen kompetensi kewargaan dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/civics.v13i1.11076>
- Budimansyah, D. (2022). *Studi Kewarganegaraan* (D. Budimansyah (ed.)). C.V. Jendela Hasanah.
- Chrysochoou, D. N. (2002). Civic competence and the challenge to EU polity-building. *Journal of European Public Policy*, 9(5), 756–773. <https://doi.org/10.1080/13501760210162348>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Edition).
- EIU. (2022). Democracy Index 2021: The China challenge. *The Economist Intelligence Unit*, 83.
- Hidayah, Y., Sapriy, Darmawan, C., Malihah, E., & Karliani, E. (2020). Promoting Civic Intelligence in Applied Science to Promote Interaction between Science: An Overview in the Perspective of Citizenship Education. *Universal Journal of Educational Research*, 8(8), 3782–3791. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080859>
- Poghosyan, G. (2019). Civic Competence as a Target Component of Education Content. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 2(4), 64–67. <https://doi.org/10.33258/birle.v2i4.492>
- Print, M., & Lange, D. (2013). Civic Education and Competences for Engaging Citizens in Democracies. In *Sense Publishers*. Sense Publishers.
- Puspitasari, R., Budimansyah, D., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2022). The Influence of Emotional Intelligence, Moral Intelligence and Intellectual Intelligence on Characters Caring for the Environmental School Students in the Perspective of Civic Education. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 636(Acec 2021), 343–348. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.062>
- Schuler, D. (2001). Cultivating society's civic intelligence: Patterns for a new "world brain." *Information Communication and Society*, 4(2), 157–181. <https://doi.org/10.1080/13691180110044434>
- Schuler, D. (2012). IFIP AICT 386 - Civic Intelligence and CSCW. In *IFIP AICT* (Vol. 386).
- Schuler, D. (2014). Pieces of Civic Intelligence: Towards a capacities framework. *E-Learning and Digital Media*, 11(5), 518–529. <https://doi.org/10.2304/elea.2014.11.5.518>
- Skarzauskiene, A. (2018). *Monitoring Collective Intelligence*. 277–280. <https://doi.org/10.1145/3272973.3274074>
- Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan : Kultur Akademis dan Pedagogis* (S. Sapriya & R. Machfiroh (eds.)). Laboratorium PKn.
- Torney-purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schuiz, W. (2001). *Citizenship and Education in 28 Countries* (Issue 10).

Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS)*. 1-126.  
<http://repository.ut.ac.id/2872/1/40115.pdf>